

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 20 Juni 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Halaman, 4)	Kamis, 20 Juni 2019	Empat Desa Masih Terisolasi	Bencana banjir di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), tak kunjung surut. Berdasarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, empat desa masih terisolasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Posko Tanggap Darurat Sultra, empat desa yang masih terisolasi di Kabupaten Konawe, yakni Desa Wawotoma, Latoma Jaya, Arombu Utama, dan Amboluto.
2	Kompas (Halaman Utama)	Kamis, 20 Juni 2019	Berita Foto	Banjir di Desa Labungga dan Desa Laronanga, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/6/2019).
3	Kompas (Halaman, 7)	Kamis, 20 Juni 2019	Dari Daendels ke Jokowi	Euforia perjalanan via jalan tol lintas Jawad an Sumatera baru selesai mengiringi arus balik mudik Lebaran. Euforia itu menghadirkan kembali ingatan kita ke awal dua abad lalu ketika Gubernur Jenderal Belanda Marshal Herman Daendels membuka proyek jalan. Meskipun Daendels asli Belanda, ia datang di Jawa membawa aspirasi Pemerintah Perancis di bawah Napoleon Bonaparte; saat itu Belanda di bawah kekuasaan Perancis.
4	Kompas (Halaman, 10)	Kamis, 20 Juni 2019	Siklus Tsunami yang menghancurkan Aceh	Tumbuh dan hancurnya Aceh masa lalu tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberulangan tsunami. Siklus bencana ala mini seharusnya menjadi dasar penataan Aceh, termasuk juga kota-kota di Indonesia yang rentan tsunami. Tsunami dahsyat terbukti pernah melanda Aceh pada tahun 1394. Kawasan pesisir yang hancur kemudian ditinggalkan sebelum kembali dipadati penduduk seiring datangnya pedagang dari mancanegara. Namun, Kota Banda Aceh yang tumbuh di atas tapak bencana itu kembali hancur saat tsunami melanda pada 26 Desember 2004.
5	Kompas (Halaman, 11)	Kamis, 20 Juni 2019	Kekeringan Ancam Petani	Beberapa daerah di Jawa Tengah mengalami kekeringan, yang puncaknya diperkirakan terjadi Juli – Agustus. Situasi ini membuat petani mendapatkan panen jauh dari memuaskan. Kekeringan menyebabkan sebagian oetani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengalami gagal panen pada masa tanam pertama.
6	Kompas (Halaman, 13)	Kamis, 20 Juni 2019	Kebutuhan Generasi Milenial Dikaji	Pemerintah mengkaji program penyediaan rumah bagi generasi milenial. Program itu berupa rumah sewa atau rumah bersubsidi bagi generasi milenial yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini jumlah kelompok milenial sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada 2020, jumlahnya diperkirakan 60 persen dari total penduduk Indonesia. Generasi milenial adalah kelompok yang lahir pada periode 1980-1999.
7	Kompas (Halaman, 16)	Kamis, 20 Juni 2019	Proyek Mandek Terganjil Pembebasan Lahan	Polisi siap turun tangan mengamankan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Sumatera Utara yang ditargetkan selesai tahun 2017. Proyek itu tertahan dua tahun karena penguasaan

				lahan tanpa bukti kepemilikan sah oleh 549 keluarga. Saat ini Sembilan keluarga memiliki sertifikat hak milik atas lahan.
8	Kompas (Halaman, 16)	Kamis, 20 Juni 2019	Wisata Jatiluhur Digenjot	Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasukkan wisata Waduk Jatiluhur dalam rencana pengembangan 2020. Kemungkinan pembuatan semacam kawasan ekonomi khusus dijadi. Beroperasi sejak tahun 1967, potensi wisata Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, dinilai bisa digarap lebih maksimal. Beberapa tahun terakhir akses menuju waduk dengan luas genangan 8300 hektar itu kian mudah dan strategis.
9	Kompas (Halaman, 18)	Kamis, 20 Juni 2019	Ironi Kemiskinan Wilayah Tengah Jateng	Sekitar 3,9 juta warga atau 11,19 persen dari total jumlah penduduk Jawa Tengah tergolong miskin. Penyumbang terbesar kemiskinan ada di sejumlah kabupaten di wilayah tengah. Penguatan basis data dan pembenahan infrastruktur menjadi modal utama untuk mengatasi kemiskinan itu.
10	Media Indonesia (Halaman, 10)	Kamis, 20 Juni 2019	3 Bendungan untuk cegah Banjir Konawe	Balai wilayah Sungai Sulawesi VI tengah menyiapkan langkah antisipasi agar banjir seperti di Konawe dan Konawe Utara tidak terjadi lagi. Selain pembangunan kolam retensi, juga perlu dibangun tiga bendungan. "Kami usulkan ini untuk 2020 dan 2021. Bendungan Pelosika, AAmeroro, dan Lasolo disarankan agar dibangun," kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Haeruddin C Maddi di Kendari, Sulawesi Tenggara.
11	Media Indonesia (Halaman, 10)	Kamis, 20 Juni 2019	Berita Foto	Pembangunan Hunian Tetap: Operator alat berat meratakan lahan yang akan digunakan sebagai alokasi pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (18/6).
12	Koran Tempo (Halaman, 24)	Kamis, 20 Juni 2019	PUPR Godok Skema Pemilikan Rumah untuk Milenial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok skema pembiayaan pemilikan rumah bagi generasi milenial. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, skema yang disiapkan bertujuan mengatasi kesenjangan ketersediaan rumah (backlog) sekaligus membantu kelompok milenial yang sulit membeli hunian karena harga makin mahal.
13	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 20 Juni 2019	Kawasan Industri Kendal & Gresik Dapat Dukungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai upaya untuk mendukung infrastruktur kawasan industri, khususnya di Kendal dan Gresik. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung Visium Indonesia 2045, yaitu memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung destinasi unggulan pariwisata, dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
14	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 20 Juni 2019	Lalu Lintas Tol Bakter Merangkak Naik	PT Utama Karya memperkirakan volume lalu lintas di jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar terus menanjak sejalan dengan pengoperasian dua ruas lanjutan menuju Palembang. Kepala Cabang Jalan Tol Bakauheni—Terbanggi Besar (Bakter) Hanung Hanindito mengatakan bahwa sejak beroperasi pada Maret 2018, trafi k kendaraan mengalami peningkatan secara perlahan. Jalan tol sepanjang 140,90 kilometer itu juga mendapat limpahan arus kendaraan saat masa angkutan Lebaran.
15	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 20 Juni 2019	Adhi Kantongi Rp 5 Triliun	PT Adhi Karya Tbk. meraup perolehan kontrak baru senilai Rp5 triliun hingga Mei 2019. Perseroan meyakini perolehan kontrak baru bakal lebih banyak pada paruh kedua tahun ini sejalan dengan iklim usaha yang lebih kondusif pascapilpres. Sementara itu, kontribusi perolehan kontrak PT Wijaya Karya

				Tbk. dari proyek di luar negeri mencapai 14% dari total raihan perseroan secara keseluruhan.
16	Bisnis Indonesia (Halaman, 20)	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Peminat KPR Milenial BTN Tinggi	Sejak diluncurkan pada Oktober 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan kredit yang disalurkan melalui kredit kepemilikan rumah atau KPR Gaesss mencapai Rp6,9 triliun hingga Mei 2019. Adapun dari awal tahun hingga Mei 2019 KPR Gaess mencatat outstanding kredit sebesar Rp3,83 triliun dan ditargetkan bisa mencapai sekitar Rp7 triliun hingga akhir 2019.

Judul	Empat Desa Masih Terisolasi	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Republika (Halaman, 4)		
Resume	Bencana banjir di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), tak kunjung surut. Berdasarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, empat desa masih terisolasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Posko Tanggap Darurat Sultra, empat desa yang masih terisolasi di Kabupaten Konawe, yakni Desa Wawotoma, Latoma Jaya, Arombu Utama, dan Amboluto.		

Empat Desa Masih Terisolasi

KENDARI — Bencana banjir di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), tak kunjung surut. Berdasarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, empat desa masih terisolasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Posko Tanggap Darurat Sultra, empat desa yang masih terisolasi di Kabupaten Konawe, yakni Desa Wawotoma, Latoma Jaya, Arombu Utama, dan Amboluto.

Pj Sekda Konawe, Santoso, membenarkan sejumlah desa di Konawe yang hingga kini masih sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan darat karena hampir seluruh titik di wilayah tersebut masih tergenang banjir dengan ketinggian antara dua sampai empat meter. "Tim relawan dari TNI dan Polri, SAR dan BPBD sudah mengirimkan bantuan logistik melalui fasilitas helikopter sehingga warga yang terjebak banjir sebagian sudah bisa tertangani," kata Santoso, Rabu (19/6).

Santoso mengatakan, selain empat desa di Kecamatan Latoma, warga juga masih terisolasi di lima desa Kecamatan Pondidaha. Bahkan, wilayah tersebut masih sulit dijangkau kendaraan roda empat yang mengirimkan bantuan logistik.

Budi, salah seorang relawan yang juga warga setempat mengatakan, akses untuk mengirim bantuan logistik terputus. Akibatnya, bantuan dari donator dan instansi hanya bisa sampai pada titik lokasi posko yang sudah ditentukan dan tidak bisa sampai ke warga. "Seharusnya pemerintah secepatnya menyediakan alat transportasi roda empat yang bisa mengangkut logistik dari posko penampung di Wawotobi ke lokasi di mana desa-desa yang masih terisolasi," ujar Budi, Rabu.

Budi mengungkapkan, setiap warga yang hendak keluar mencari bahan pangan di ibu kota kecamatan dengan menggunakan roda dua, harus mengeluarkan uang sedikinya Rp 100 hingga Rp 150 ribu untuk sekali penyeberangan menyewa jasa rakit (pincara). Belum lagi, harga pangan dirasakan kian mahal.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rita Rosita mengatakan, 5.847 kepala keluarga (KK) atau 22.573 jiwa terdampak banjir. "Pada Selasa (18/6), teridentifikasi genangan di 144 desa dan 22 kelurahan pada 24 kecamatan," kata Rita, Rabu. Intensitas hujan tinggi mengakibatkan debit Sungai Konaweheha, Sungai

Lahambuti, dan Sungai Rawa Aopa meningkat sehingga terjadi banjir.

Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe melaporkan, hingga Selasa lalu masih ada genangan setinggi 30 sentimeter hingga satu meter di Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Wonggeduku, dan Kecamatan Wonggeduku Barat. Ruas jalan poros Pondidaha masih tergenang sepanjang tiga kilometer dan hanya dapat dilewati truk dan mobil kabin ganda. Selain itu, dua kecamatan, yaitu Rوتا dan Latoma, masih terisolasi.

"Logistik dan bantuan dikirim menggunakan helikopter. BNPB dan Penerbang TNI Angkatan Darat masing-masing mengerahkan satu unit helikopter untuk menjangkau kecamatan yang terisolasi. Pengiriman bantuan juga dilakukan menggunakan perahu karet," jelas Rita. BPBD Kabupaten Konawe menyiagakan tim evakuasi serta memantau kondisi terkini. Karena potensi penyakit akibat banjir mulai muncul, tim medis dari Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana telah melakukan pelayanan kesehatan kepada korban di pos-pos penyintas di kecamatan dan desa.

Sementara itu, banjir telah menye-

INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN TERDAMPAK BANJIR	
● Rumah	4.688 unit
● Fasilitas Pendidikan	95 sekolah
● Lahan Pertanian	3.246 hektare sawah, 357 hektare lahan jagung, 385 hektare lahan lainnya.

babkan kerusakan di berbagai sektor. Rumah yang terendam dilaporkan 4.688 unit dengan 192 rusak berat, 513 rusak sedang, dan 575 rusak ringan. Bangunan sekolah yang terendam 32 unit taman kanak-kanak, 49 sekolah dasar, dan 14 sekolah menengah pertama. Di sektor pertanian, banjir merendam 3.246 hektare sawah, 357 hektare lahan jagung, dan lainnya 385 hektare.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memulihkan akses jalan

penghubung yang sempat terputus akibat banjir. Akses jalan dari Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara (Sultra) menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sudah bisa kembali dilalui sejak Senin lalu setelah perbaikan sementara Jembatan Asera.

"Perbaikan dilakukan dengan memasang Jembatan Bailey sepanjang 30 meter. Kapasitas beban maksimal jembatan bailey tersebut, yakni 8 ton dan kini bisa dilewati empat unit kendaraan roda empat satu arah secara bergantian," kata Kepala BPJN XXI Kendari, Yohanis Tulak-Todirra, Selasa lalu. Kemudian, jembatan lainnya yang sudah diperbaiki, yakni Jembatan Rahabangga di Desa Uepai, Kabupaten Konawe.

Sebelumnya, banjir mengakibatkan tergerusnya oprit (timbunan tanah) Jembatan Rahabangga mengakibatkan terputusnya jalur lalu lintas antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur (Jalan Trans Sulawesi Tenggara menuju Sulawesi Selatan). Jembatan lainnya yang tengah ditangani, yakni Jembatan Woimendaa sepanjang 50,2 meter di Kabupaten Kolaka yang merupakan bagian dari Jalan Trans-Sulawesi menuju Sulawesi Selatan.

■ antara ed: nora azizah

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Banjir di Desa Labungga dan Desa Laronanga, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/6/2019).		

Banjir di Kabupaten Konawe Utara



ANTARA/JOJON

Foto udara banjir di Desa Labungga dan Desa Laronanga, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/6/2019). Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menambah masa tanggap darurat bencana banjir hingga Minggu (30/6) akibat banyaknya desa yang masih terendam banjir disertai lumpur, belum pulihnya akses jalan Trans-Sulawesi, serta masih banyaknya warga yang mengungsi, yakni 8.542 orang.

Judul	Dari Daendels ke Jokowi	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 7)		
Resume	Euforia perjalanan via jalan tol lintas Jawa dan Sumatera baru selesai mengiringi arus balik mudik Lebaran. Euforia itu menghadirkan kembali ingatan kita ke awal dua abad lalu ketika Gubernur Jenderal Belanda Marshal Herman Daendels membuka proyek jalan. Meskipun Daendels asli Belanda, ia datang di Jawa membawa aspirasi Pemerintah Perancis di bawah Napoleon Bonaparte; saat itu Belanda di bawah kekuasaan Perancis.		

Dari Daendels ke Jokowi

Ahmad Suaedy
Anggota Ombudsman RI

No governor-general before him [had] thought of it and I believe none after him will dare to contemplate it [either]. Javanese with a little education who know the history of Napoleon compare him to Marshal Daendels

Peter Carey, 2013

Euforia perjalanan via jalan tol lintas Jawa dan Sumatera baru selesai mengiringi arus balik mudik Lebaran. Euforia itu menghadirkan kembali ingatan kita ke awal dua abad lalu ketika Gubernur Jenderal Belanda Marshal Herman Willem Daendels membuat proyek jalan pos.

Meskipun Daendels asli Belanda, ia datang di Jawa membawa aspirasi Pemerintah Perancis di bawah Napoleon Bonaparte; saat itu Belanda di bawah kekuasaan Perancis.

Daendels, mantan komandan perang Perancis dengan pangkat Letnan Jenderal, satu-satunya orang Belanda peringkat tertinggi di angkatan bersenjata Perancis. Dalam posisi seperti itu, ia datang di Jawa berinspirasi tiga spirit utama: Revolusi Perancis dengan nasionalisme dan sekularisme keras; kebijakan Napoleon berupa modernisasi dengan tangan besi; dan penataan birokrasi modern dengan menundukkan feodalisme sebagaimana terjadi pada Revolusi Perancis.

Misi utama Daendels, di samping mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, tak kalah tinggi: mengambil alih seluruh

tanggung jawab VOC yang bangkrut dengan seluruh utang-utangnya serta tradisi korupsinya; membantu mengembalikan ekonomi Belanda yang karut-marut oleh perang; serta modernisasi pemerintah penjajahan Belanda di Jawa dengan menundukkan (saat itu relatif independen dari sentuhan VOC) para raja di Jawa.

Jadi, proyek *Postweg* Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukan di ujung timur Jawa sepanjang 1.000 km itu—sebagian ahli menyebutnya sebagai jalan tol—hanya salah satu proyek mercusuar Daendels mencapai tiga target tersebut.

Tidak mudah

Dengan rencana itu sesungguhnya di samping menyatukan secara fisik, Daendels sedang menyatukan sistem pemerintahan Jawa dengan pemerintahan modern ala Perancis yang saat itu masih di bawah kekuasaan berbagai kerajaan atau keraton yang berbeda-beda.

Namun, Daendels gagal mengoperasikan mesin pemerintahan modern bentukannya yang tanpa penyesuaian dengan tradisi Jawa, hubungan antara keraton/pejabat daerah dan masyarakat yang amat kuat. Kemudian Daendels justru menggunakan mesin tradisional untuk target yang tinggi itu.

Kebutuhan akan komoditas ekspor ke Eropa, seperti kopi, lada, dan gula mendorong Daendels memaksa rakyat menanam komoditas ekspor. Rakyat juga masih diwajibkan membayar pajak penghasilan di samping pajak tanah. Untuk mengontrol keberhasilan proyek itu, Daendels membatasi kekuasaan dan relasi raja dengan rakyat, tetapi dengan mengoperasikan para pejabat daerah sebagai penagih target komoditas ekspor dan pajak serta mengawasi perilaku rakyat.

Untuk menambah pemasukan, Daendels menyewakan tanah kepada orang-orang asing, khususnya Eropa dan Tionghoa. Untuk mengerjakan proyek raksasa seperti jalan tol, Daendels



memberlakukan kerja paksa.

Dengan itu sesungguhnya tak ada modernisasi apa pun dari Daendels atas masyarakat Jawa kecuali wujud fisik, seperti jalan raya; rakyat justru menderita. Sementara itu, petani di desa dipaksa menanam jenis tanaman tertentu dan wajib bayar pajak di bawah kontrol para pejabat lokal yang sering tak semena-mena, sedangkan para pekerja atau buruh dipaksa kerja paksa.

Revitalisasi mudik

Harus diakui, baru setelah dua abad lebih rencana Daendels, jalan tol lintas Jawa jadi kenyataan di bawah Presiden Jokowi—juga jalan tol lintas Sumatera, Kalimantan, dan lainnya nanti. Tanya yang menyeruak kini, siapa yang diuntungkan dengan jalan tol itu? Bagi Daendels, pembangunan *Postweg* hanyalah bagian dari target-target kemakmuran rakyat Belanda, maka dengan segala cara difungsikan sebagai peningkatan ekonomi negaranya meski mengorbankan rakyat Jawa sendiri.

Tantangan saat ini jelas berbeda. Para pedagang kecil dan menengah di pinggir jalan reguler menjerit karena nyaris seluruh pembelinya pindah ke jalan tol. Karena itu, harus dipikirkan, jangan sampai fungsi jalan tol hanya dinikmati mereka pemilik mobil atau orang kaya yang berpelesiran, sedangkan masyarakat luas dirugikan.

Jalan tol harus berimplikasi langsung kepada kemakmuran rakyat sekitar, apakah petani atau buruh. Jalan tol, karena itu, harus ditempatkan dalam konteks pembangunan yang le-

bih luas.

Di samping pembangunan *Postweg*, Daendels juga telah memaksimalkan posisi desa, tempat sebagian besar penduduk berada, sebagai pusat produksi rakyat dan pemasukan negara dengan mendorong komoditas ekspor. Fungsi jalan raya terutama untuk mengangkut produk-produk tersebut. Dengan UU No 6/2014 tentang Desa kini posisi desa jauh lebih strategis. Namun, tidak seperti era Daendels dengan cara pemaksaan dan penindasan, kini motivasi kewirausahaan dengan penghargaan terhadap kreasi dan produksi masyarakat desa harus lebih nyata.

Salah satu cara menggairahkan kompetisi dan kreasi desa adalah ketika kreasi dan produksi mereka dihargai lebih-lebih jika dengan harga ekspor. Untuk itu, revitalisasi "mudik" mungkin salah satu cara strategis. Mudik selama ini hanya diartikan sebagai sesuatu yang musiman dan spontan pada hari-hari libur, seperti Idul Fitri dan Natal atau libur panjang lainnya. Mudik kini mungkin harus direvitalisasi sebagai suatu yang terencana, sistemik, dan berkelanjutan.

Pemudikan bahkan mungkin bisa diberi arti sebagai lawan kata *urbanisasi* dan bukan *ruralisasi*. Ruralisasi sering diartikan sebagai suatu perpindahan dari kota ke desa ketika kota sudah benar-benar penuh sehingga ruralisasi sebagai tindakan yang terpaksa tanpa rencana dan bersifat reaktif. Sementara pemudikan harus diberi arti bukan kembali ke desa hanya secara fisik dan spontan, melainkan suatu pola kolaborasi modal, investasi, dan kemampuan secara produktif dan kreatif antara mereka yang telanjur pindah ke kota atau bahkan orang kota dengan desa.

Dengan demikian, mengacu pada era digital, desa tak lagi terbatas pada produksi yang bersifat agraris, melainkan juga modern dan digital. Berulah jalan tol memiliki konteks pembangunan yang luas.

Judul	Siklus Tsunami yang menghancurkan Aceh	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 10)		
Resume	Tumbuh dan hancurnya Aceh masa lalu tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberulangan tsunami. Siklus bencana alam ini seharusnya menjadi dasar penataan Aceh, termasuk juga kota-kota di Indonesia yang rentan tsunami. Tsunami dahsyat terbukti pernah melanda Aceh pada tahun 1394. Kawasan pesisir yang hancur kemudian ditinggalkan sebelum kembali dipadati penduduk seiring datangnya pedagang dari mancanegara. Namun, Kota Banda Aceh yang tumbuh di atas tapak bencana itu kembali hancur saat tsunami melanda pada 26 Desember 2004.		

Siklus Tsunami yang Menghancurkan Aceh

Tumbuh dan hancurnya Aceh masa lalu tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberulangan tsunami. Siklus bencana alam ini seharusnya menjadi dasar penataan Aceh, termasuk juga kota-kota lain di Indonesia yang rentan tsunami.

Ahmad Arif

Tsunami dahsyat terbukti pernah melanda Aceh pada tahun 1394. Kawasan pesisir yang hancur kemudian ditinggalkan sebelum kembali dipadati penduduk seiring datangnya pedagang dari mancanegara. Namun, Kota Banda Aceh yang tumbuh di atas tapak bencana itu kembali hancur saat tsunami melanda pada 26 Desember 2004.

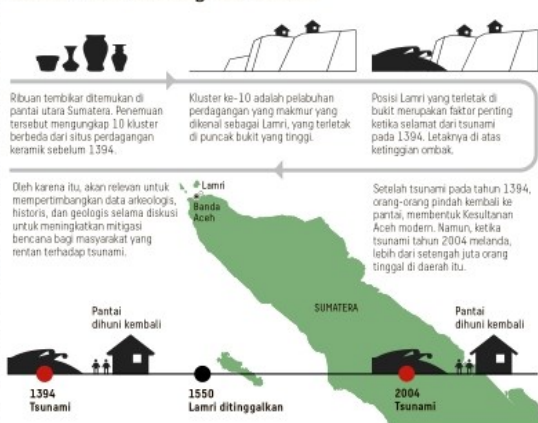
Rekonstruksi pola penghuni penduduk di Aceh pada masa lalu itu diketahui berdasarkan kajian kolaboratif tim peneliti yang dipimpin Patrick Daly dan Kerry Sieh dari Earth Observatory of Singapore (EOS), Universitas Teknologi Nanyang. Hasil kajian dipublikasikan di jurnal *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS) akhir Mei 2019. Selain dari EOS, peneliti yang terlibat juga berasal dari Insight Centre for Data Analytics (Universitas Maynooth), Universitas Syiah Kuala, dan Centre for Islamic Studies (Universitas Oxford).

Kajian dilakukan dengan menganalisis sebaran puluhan ribu pecahan keramik dari abad ke-11 hingga abad ke-14 dan lebih dari 5.000 ukiran batu nisan, yang ditemukan di pesisir utara Banda Aceh, Aceh Besar. Ada bukti bahwa tsunami yang terjadi sekitar 600 tahun lalu telah menghancurkan sembilan komunitas di sepanjang 40 kilometer pantai ini. "Hanya kawasan Lamri, yang berada di atas tebing di ujung tanjung yang selamat dari tsunami saat itu," sebat Daly dan tim.

Temuan itu melengkapi kajian-kajian sebelumnya, yang telah menemukan perulangan tsunami di Aceh. Contohnya, kajian paleotsunami oleh Moncke dan Widjo Konggo di jurnal *Nature*, 2008, menemukan dua endapan tsunami besar di Aceh sebelum tahun 2004, yaitu pada 1300 dan 1500.

Kemudian, ada kajian lebih

Tembikar dari Masa Lalu, Sebuah Cerita Arkeologi dan Tsunami



rinci melalui paleogeodesi dengan mengukur pergerakan naik-turun lokal mikrotidal mengikuti siklus gempa besar pada masa lalu oleh Meltzner dan Kerry Sieh serta tim dipublikasikan di jurnal *Geophysical Research*, 2010. Kajian itu memastikan tsunami pernah terjadi di Aceh pada 1394 dan 1450.

Mitigasi bencana

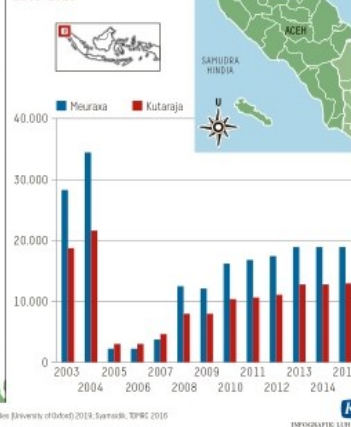
"Kajian kami kali ini memberikan pembelajaran penting untuk mitigasi bencana ke depan. Tsunami terbukti telah berulang kali terjadi di Aceh, tetapi warga ternyata selalu kembali ke pesisir hingga kemudian hancur lagi," kata Nazi Ismail, Ketua Program Studi

Magister Ilmu Kebencanaan, Universitas Syiah Kuala, yang terlibat dalam kajian ini. Menurut Nazi, selain melaksanakan kajian arkeologi, tim peneliti juga mewawancarai para tetua setempat. Kawasan Lamri yang disebut dalam tsunami pada 1394 kini masuk dalam Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. "Lokasi Lamri ini memang di atas bukit, lebih dari 20 meter dari pantai," katanya.

Rekonstruksi jejak arkeologi menunjukkan, ada sembilan kawasan permukiman yang berada sepanjang 40 kilometer garis pantai yang ditinggalkan karena hancur akibat dilanda tsunami pada 1394. Dengan mem-

bandingkan kehancuran daerah pesisir akibat tsunami 2004, para peneliti menyimpulkan, kekuatan tsunami sekitar 600 tahun lalu itu setara kekuatannya dengan tsunami 2004.

Pertumbuhan penduduk masyarakat di pesisir Aceh 2003-2015



Kejayaan Lamri

Lamri yang anan dari tsunami 1394 lalu tumbuh pesat sehingga namanya dikenal di sejumlah negara sebagai pusat perdagangan rempah di Selat Malaka. Pada awal abad ke-15 itu, nama Lamri atau Lamuri banyak disebut dalam referensi China, Arab, dan Melayu.

Salah satu naskah China menyebutkan, Laksamana Zheng He atau dikenal sebagai Cheng Ho pernah berkunjung ke Lamri pada 1405, 1408, dan 1416. Berdasarkan periode pembuatannya, empat pecahan keramik yang ditemukan Daly dan tim di Lamri diduga merupakan sisa persembahan yang dibawa Zheng He.



pusat perdagangan dari Lamri ke pantai sebelah barat atau ke arah pesisir Banda Aceh saat ini diduga terkait dengan kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511. Pedagang Arab kemudian memilih tempat yang lebih terlindung dari Selat Malaka. Kawasan pesisir inilah yang lalu berkembang menjadi Kesultanan Aceh dan kemudian menjadi Kota Banda Aceh, yang hancur dilanda tsunami 2004.

Dengan melihat data ini, kita bisa melihat pembangunan kembali pelabuhan dagang dan permukiman di pesisir Aceh hanya membutuhkan waktu sekitar satu abad setelah tsunami 1394. Namun, setelah tsunami 2004, penghuni kembali pesisir yang sebelumnya hancur karena tsunami terjadi lebih cepat lagi.

Kajian dari Syamsiddik dan tim dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala di jurnal *Natural Hazard* 2017 menunjukkan, hanya dalam sepuluh tahun setelah tsunami, rumah-rumah dan aktivitas ekonomi baru telah dibangun kembali di pesisir yang sebelumnya hancur. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi awal untuk menajuh minimal 500 meter dari garis pantai gagal.

Berdasarkan wawancara terhadap 457 keluarga yang kembali ke zona terdampak, risiko tsunami hanya menjadi perhatian kecil. Beberapa faktor lain justru lebih menjadi perhatian meliputi antara lain harga tanah atau biaya sewa, kedekatan dengan tempat kerja, dan ketersediaan fasilitas publik.

Pembangunan kembali Aceh yang berisiko tsunami menjadi siklus yang berulang. Bahkan, risiko bencana itu bahkan bisa lebih besar karena jumlah penduduk yang bertambah di zona rentan lebih padat dari sebelumnya dan memori tentang bencana yang memudar.

Salah satu dugaan pergeseran

Judul	Kekeringan Ancam Petani	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 11)		
Resume	Beberapa daerah di Jawa Tengah mengalami kekeringan, yang puncaknya diperkirakan terjadi Juli – Agustus. Situasi ini membuat petani mendapatkan panen jauh dari memuaskan. Kekeringan menyebabkan sebagian petani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengalami gagal panen pada masa tanam pertama.		

Kekeringan Ancam Petani

Beberapa daerah di Jawa Tengah mengalami kekeringan, yang puncaknya diperkirakan terjadi Juli–Agustus. Situasi ini membuat petani mendapatkan panen jauh dari memuaskan.

BREBES, KOMPAS — Kekeringan menyebabkan sebagian petani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengalami gagal panen pada masa tanam pertama. Padahal, petani sudah mengeluarkan biaya produksi hampir dua kali lipat untuk menggali sumur dan mengoperasikan pompa air.

Kerugian akibat gagal panen diderita Tursipah (58), warga Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pada musim tanam pertama Maret-Mei lalu, Tursipah menghabiskan modal sekitar Rp 20 juta untuk luasan lahan tanam sekitar 0,25 hektar. Modal tersebut sudah termasuk untuk menggali sumur air bawah tanah dan mengoperasikan pompa guna menyalasi kekeringan.

Dari luasan itu, ia menghasilkan

kan 8 kuintal bawang merah dengan nilai jual Rp 9,2 juta. Padahal, biasanya, saat tidak dilanda kekeringan, lahan milik Tursipah mampu menghasilkan bawang merah sekitar 2 ton dengan harga jual sekitar Rp 24 juta.

"Untuk panen kali ini saya asal langsung jual saja. Rasanya tidak mungkin saya mematok bawang ini dengan harga tinggi. Sebab, kualitas bawang dari hasil panen ini memang jelek," kata Tursipah saat menyortir hasil panennya, Rabu (19/6/2019).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes Yulia Hendrawati mengaku belum mendaftarkan seluruh luasan lahan bawang merah yang gagal panen. Sejauh ini baru dua kelompok tani di Desa Krasak yang melaporkan gagal

panen akibat kekeringan.

Normalnya, luas lahan tanam bawang merah di Kabupaten Brebes adalah 30.000 hektar. Dari luas lahan tersebut, Brebes bisa menghasilkan bawang 320.000 ton per tahun atau sekitar 30 persen dari 900.000 ton kebutuhan bawang merah nasional per tahun.

Untuk mencegah gagal panen meluas, DPKP Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan dinas-dinas lain terkait strategi menyuplai air. Sejauh ini, solusi yang ditawarkan adalah pemompaan air dari sungai atau air bawah tanah. Cara ini banyak dipilih petani yang telanjur menanam bawang merah.

Waduk menyusut

Kekeringan berdampak terhadap Waduk Cacaban yang terletak di Kecamatan Kedung-

banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada Rabu sore, volume air di Waduk Cacaban tinggal 33 juta meter kubik. Pada kondisi normal, volume air waduk itu sekitar 49 juta meter kubik.

Pengelola Waduk Cacaban, Edi Kusworo, menuturkan, penurunan volume air terjadi sejak April 2019. Waduk Cacaban difungsikan untuk mengairi lahan pertanian 17.481 hektar di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Tarub, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Adiwerna, dan Kecamatan Kramat.

Dampak penurunan volume air Waduk Cacaban terlihat di sejumlah lahan pertanian di Desa Mandika, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Sebagian petani memanfaatkan air sungai untuk mengairi lahan. Mesin-mesin pompa dan pipa air

terlihat di beberapa tempat untuk mengalirkan air dari sungai ke lahan pertanian.

Secara terpisah, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indra Gustari, di Jakarta, menyatakan, hampir seluruh Jawa telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli-Agustus 2019.

Di luar Jawa, kondisi serupa diprediksi terjadi di daerah yang berada di selatan khatulistiwa, seperti Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian selatan.

"Khusus Sulawesi, sebagian besar wilayahnya diprediksi mengalami puncak kemarau pada Agustus-September," katanya. (XTI/MEL/TAN)

Judul	Kebutuhan Generasi Milenial Dikaji	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 13)		
Resume	Pemerintah mengkaji program penyediaan rumah bagi generasi milenial. Program itu berupa rumah sewa atau rumah bersubsidi bagi generasi milenial yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini jumlah kelompok milenial sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada 2020, jumlahnya diperkirakan 60 persen dari total penduduk Indonesia. Generasi milenial adalah kelompok yang lahir pada periode 1980-1999.		

PERUMAHAN

Kebutuhan Generasi Milenial Dikaji

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengkaji program penyediaan rumah bagi generasi milenial. Program itu berupa rumah sewa atau rumah bersubsidi bagi generasi milenial yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini jumlah kelompok milenial sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada 2020, jumlahnya diperkirakan 60 persen dari total penduduk Indonesia. Generasi milenial adalah kelompok yang lahir pada periode 1980-1999.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyampaikan, pemerintah sedang mengkaji skema penyediaan perumahan untuk generasi milenial. Kajian itu dilakukan tim yang antara lain melibatkan akademisi, komunitas, swasta, dan birokrasi.

"(Skema) ini mendesak karena jumlah milenial mencapai 80 juta orang," katanya di acara Indonesian Housing Forum bertema "Penyediaan Hunian Milenial di Perkotaan Berkelanjutan" di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Ia menambahkan, perumahan bagi generasi milenial akan mengarah ke rumah sewa atau rumah sederhana bersubsidi. Pihaknya menjajaki kerja sama

dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan.

Ada tiga kluster perumahan milenial yang dikaji, antara lain rumah susun sewa untuk generasi milenial yang baru lulus dan belum memiliki penghasilan. Ada juga rumah susun sederhana milik bersubsidi untuk generasi milenial yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

"Adapun untuk generasi milenial yang sudah maju (penghasilannya), silakan beli sendiri," katanya.

Masalah

Jumlah generasi milenial yang terus bertambah akan diiringi dengan kebutuhan terhadap rumah layak huni dan berkualitas, tetapi dengan harga terjangkau.

"Di masa mendatang, permasalahan yang akan dihadapi generasi milenial adalah harga rumah yang terus naik dan memengaruhi daya jangkau kaum milenial. Ada juga hambatan memperoleh subsidi bagi masyarakat menengah," ujar Khalawi.

Pemerintah mendorong penyediaan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sejuta rumah. Nantinya, program sejuta rumah harus terus diadaptasi

dengan kebutuhan generasi milenial yang jumlahnya sangat signifikan.

Tahun ini pemerintah menargetkan program sejuta rumah berupa pembangunan fisik sebanyak 215.503 unit senilai Rp 7,57 triliun. Adapun bantuan pembiayaan perumahan sebanyak 419.858 unit senilai Rp 11,51 triliun. Pada 2015-2018, realisasi program sejuta rumah sebanyak 3.542.318 unit.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono menyebutkan, harga rumah saat ini telah melebihi harga normal. Hal ini tecermin dari hasil survei BTN, yakni indeks harga rumah nasional per Maret 2019 adalah 163,9. Kenaikan harga properti per Maret 2019 sebesar 7,34 persen secara tahunan atau lebih tinggi daripada kenaikan harga yang dihitung per Maret 2018.

Pembangunan infrastruktur merupakan syarat pendukung kenaikan harga rumah. Kenaikan harga rumah dinilai sebagai indikator properti memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Faisal Safa mengemukakan, pihaknya bekerja sama dengan BTN mengkaji skema pembiayaan yang tepat bagi generasi milenial. (LKT)

Judul	Proyek Mandek Terganjil Pembebasan Lahan	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 16)		
Resume	Polisi siap turun tangan mengamankan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Sumatera Utara yang ditargetkan selesai tahun 2017. Proyek itu tertahan dua tahun karena penguasaan lahan tanpa bukti kepemilikan sah oleh 549 keluarga. Saat ini Sembilan keluarga memiliki sertifikat hak milik atas lahan.		

TOL MEDAN-BINJAI

Proyek Mandek Terganjil Pembebasan Lahan

MEDAN, KOMPAS — Polisi siap turun tangan mengamankan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Sumatera Utara yang ditargetkan selesai tahun 2017. Proyek itu tertahan dua tahun karena penguasaan lahan tanpa bukti kepemilikan sah oleh 549 keluarga.

Saat ini, sembilan keluarga memiliki sertifikat hak milik atas lahan. "Kepada mereka yang menguasai lahan tanpa bukti kepemilikan sah, kami akan proses tegas. Jangan sampai proyek strategis nasional terganggu," kata Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Andrianto saat meninjau pembangunan tol, Rabu (19/6/2019).

Lahan bermasalah sepanjang 800 meter itu ada di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara.

Hingga kini, ruas tol yang menurut rencana sepanjang 16,8 kilometer baru tersambung 13 km. Jumlah pengguna tol pun belum maksimal karena belum tersambung ke ruas lain yang terbangun (*existing*).

Ketua Tim Pengadaan Lahan yang juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Bambang Priono mengatakan, masalah pembebasan lahan itu

sebenarnya sudah ada titik terang menyusul diskresi dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Polri. Warga sudah sepakat dengan mekanisme dan besaran ganti rugi.

"Namun, warga yang mendapat ganti rugi hanya mereka yang mempunyai bangunan dan surat keterangan dari kelurahan," kata Bambang.

Belakangan, kata Bambang, para penggarap lahan di lahan itu juga menuntut ganti rugi. "Penggarap lahan menuntut ganti rugi padi, pisang, dan tanaman lain. Jelas kami tidak bisa memberi karena mereka bertani tanpa izin pemilik lahan," katanya.

Target meleset

Hestu Budi, pimpinan proyek Tol Medan-Binjai dari PT Hutama Karya, mengatakan, akibat berlanjutnya masalah itu, mereka belum bisa memulai pengerjaan di sepanjang 800 meter lahan itu. Padahal, proyek itu amat penting karena menghubungkan Medan-Binjai dengan ruas tol lain.

"Jika pembebasan lahan bisa segera dilakukan, kami optimistis bisa menyelesaikan konstruksi paling lama Desember tahun ini," katanya.

Penyelesaian pembangunan konstruksi, kata Hestu, akan



KOMPAS/NIKSON SINAGA

Warga melintas di sekitar lokasi konstruksi Jalan Tol Medan-Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, Rabu (19/6/2019). Pembangunan jalan tol tersebut sudah dua tahun terkendala pembebasan lahan sehingga baru bisa beroperasi 13 kilometer dari total 16,8 kilometer.

menghubungkan Tol Medan-Binjai dengan ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 34 km dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,8 km. Jika sudah tersambung, Tol Medan-Binjai akan terhubung ke Kota Medan, Pelabuhan Belawan, Bandara Kualanamu, hingga Kota Tebing

Tinggi.

Pekerjaan konstruksi di lahan itu tergolong sulit karena menyatukan dua ruas tol sekaligus menjadi satu gerbang tol. Untuk itu, di Gerbang Tol Tanjung Mulia akan dibangun simpang susun hingga tiga lapis jalan layang dengan 10 jalur jalan. (NSA)

Judul	Wisata Jatiluhur Digenjot	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 16)		
Resume	Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasukkan wisata Waduk Jatiluhur dalam rencana pengembangan 2020. Kemungkinan pembuatan semacam kawasan ekonomi khusus diijazahi. Beroperasi sejak tahun 1967, potensi wisata Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, dinilai bisa digarap lebih maksimal. Beberapa tahun terakhir akses menuju waduk dengan luas genangan 8300 hektar itu kian mudah dan strategis.		



Suasana Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/6/2019). Dalam kunjungan ke Waduk Jatiluhur, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong agar potensi pariwisata waduk strategis di Jawa Barat itu terus dikembangkan sehingga turut meningkatkan perekonomian daerah.

Wisata Jatiluhur Digenjot

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasukkan wisata Waduk Jatiluhur dalam rencana pengembangan 2020. Kemungkinan pembuatan semacam kawasan ekonomi khusus diijazahi.

PURWAKARTA, KOMPAS — Beroperasi sejak tahun 1967, potensi wisata Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, dinilai bisa digarap lebih maksimal. Beberapa tahun terakhir, akses menuju waduk dengan luas genangan 8.300 hektar itu kian mudah dan strategis.

Lokasi Jatiluhur juga dekat Pintu Tol Cipularang dan Purbaleunyi. Akses utama juga mulus dan dalam kondisi baik.

Ke depan, daerah sekitar Jatiluhur akan dilewati kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Oleh karena itu, selain sebagai pembangkit listrik untuk Jawa-Bali serta sumber irigasi dan air baku bagi DKI Jakarta, salah satu waduk terbesar di Indonesia itu juga berpotensi dijadikan tujuan wisata.

Tantangan pengembangan wisata Waduk Jatiluhur itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengun-

jungi Waduk Jatiluhur, Rabu (19/6/2019). Turut hadir Direktur Utama Perum Jasa Tirta II U Saefudin Noer, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik.

Menurut Kamil, potensi Jatiluhur menyimpan unsur multidimensi. Selain sumber irigasi, air minum, sarana perikanan, dan pembangkit listrik, air Jatiluhur juga memiliki potensi pariwisata dan budaya yang harus dikembangkan.

"Dalam pengelolaan pariwisata harus menyentuh dua segmen, menengah ke bawah dan menengah ke atas. Saya melihat Jatiluhur belum sampai ke tahap itu," katanya.

Saat ini, ungulan daya tarik pengunjung ke Waduk Jatiluhur adalah wisata kuliner dan Jatiluhur Water Park. Pengunjung bisa menikmati berbagai

menu ikan di restoran terapung atau tepi waduk sambil melihat pemandangan. Pengunjung juga dapat mengarungi waduk dengan kapal motor dengan tarif sewa Rp 15.000 per orang.

Ada pula hotel dan taman bermain anak-anak serta hamparan tanah lapang untuk bermain layang-layang.

Menurut Kamil, pengembangan potensi wisata mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberadaan penginapan, hotel, restoran, dan warung juga turut menyumbang pemasukan pajak bagi pemerintah daerah.

Rencana pengembangan

Tahun ini, Pemprov Jabar bersama Perum Jasa Tirta II dan Pemkab Purwakarta bersinergi mengoptimalkan wisata di kawasan Waduk Jatiluhur. Pengembangan itu dilakukan secara bertahap dan menjadi

bagian dari puluhan rencana pengembangan prioritas Jabar senilai Rp 500 miliar.

Sebagai langkah awal, akan dilakukan observasi. Hal itu untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata Jatiluhur.

Rencana itu terbagi dalam rencana jangka pendek (enam bulan), jangka menengah (dua tahun), dan jangka panjang (lebih dari dua tahun). Setelah itu, potensi Jatiluhur akan dipetakan untuk dibuat kawasan ekonomi khusus. Proyek pengembangan Jatiluhur akan dimulai awal tahun 2020.

Kamil mengakui pemprov belum menentukan perencanaan anggaran program pengembangan itu. Namun, ia berharap banyak investor berminat menanamkan modal terkait proyek Jatiluhur.

"Mesin pertumbuhan itu investasi. Tidak ada investasi, maka tidak ada pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Kita

harus proaktif mengenalkan potensi ini," ujarnya.

Terkait upaya mempromosikan wisata Jatiluhur, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II U Saefudin Noer mengatakan, mereka akan menggelar sejumlah kegiatan. Beberapa di antaranya Paddle Board Festival pada 13-14 Juli 2019, International Jatiluhur Jazz Festival pada 14-15 September 2019, dan lari bertajuk "Fun and Family Run 10K" di akhir tahun 2019.

"Kami akan memaksimalkan kegiatan ini untuk menarik animo pengunjung sehingga memberi manfaat bagi masyarakat dan perekonomian masyarakat," kata Saefudin.

Kegiatan itu ditargetkan mendorong kunjungan. "Kami berharap kunjungan ke Purwakarta naik hingga 30 persen," kata Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Heri Anwar. (MEL)

Judul	Ironi Kemiskinan Wilayah Tengah Jateng	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Sekitar 3,9 juta warga atau 11,19 persen dari total jumlah penduduk Jawa Tengah tergolong miskin. Penyumbang terbesar kemiskinan ada di sejumlah kabupaten di wilayah tengah. Penguatan basis data dan pembenahan infrastruktur menjadi modal utama untuk mengatasi kemiskinan itu.		

Ironi Kemiskinan Wilayah Tengah Jateng

Sekitar 3,9 juta warga atau 11,19 persen dari total jumlah penduduk Jawa Tengah tergolong miskin. Penyumbang terbesar kemiskinan ada di sejumlah kabupaten di wilayah tengah. Penguatan basis data dan pembenahan infrastruktur menjadi modal utama untuk mengatasi kemiskinan itu.

Aditya Putra Perdana

Persentase Penduduk Miskin di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2018

Sejumlah daerah di wilayah tengah, seperti Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga, nyaris selalu masuk 10 daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Alasan kesehatan terkait sanitasi dan akses pendidikan menjadi isu krusial terkait kemiskinan di daerah itu.

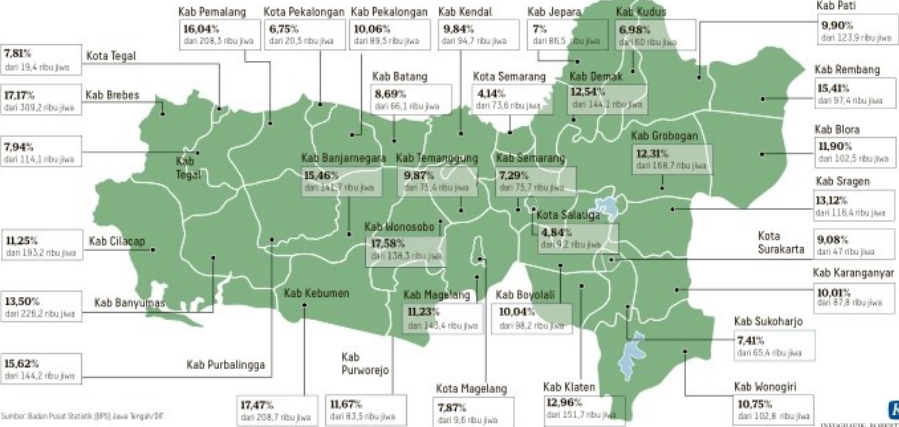
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat, persentase penduduk miskin di Wonosobo mencapai 17,58 persen atau tertinggi di Jateng pada 2018. Purbalingga (15,62 persen) di urutan kelima dan Banjarnegara (15,46 persen) di urutan keenam. Sementara garis kemiskinan Banjarnegara Rp 278.210 per kapita per bulan, menempati urutan kedua terendah di Jateng. Wonosobo ada di urutan ke-10 dengan Rp 323.490 per kapita per bulan.

Dalam pengukuran BPS, ada garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM) yang terkait pemenuhan kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dari sejumlah indikator tersebut, akses sanitasi yang terkait dengan kesehatan dan lama bersekolah menjadi isu krusial di Wonosobo dan Banjarnegara.

Minimnya akses sanitasi, misalnya, tecermin dari kondisi Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Di desa itu, hampir separuh warga desa tak memiliki jamban sehat pribadi.

"Biaya membuat jamban pribadi cukup besar, bisa sampai Rp 1 juta," kata Yanto (31), salah seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir.

Penghasilannya sekitar Rp 60.000 per hari hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan dua



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah/DF

anak. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Haris Gunarto mengakui, sisi kesehatan terkait sanitasi masih rendah. Hingga kini, capaian bebas buang air besar sembarangan (ODF) baru sekitar 58 persen. "Masih ada sekitar 103.000 rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi atau jamban sehat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencanangkan percepatan pembangunan bebas buang air besar sembarangan. Alokasi dana desa pun didorong untuk mengatasi problem rendahnya kesadaran akan sanitasi. Pada 2019, Rp 8,8 miliar dari dana desa dialokasikan untuk pen-

capaian bebas buang air besar sembarangan. "Sebelumnya, setiap desa hanya menganggarkan Rp 10 juta-Rp 20 juta, tetapi setelah kami dorong, kini menjadi Rp 100 juta-Rp 200 juta (untuk pembuatan jamban)," katanya.

Persoalan serupa dijumpai di Desa Gentsari, Kecamatan Pagedongan, yang letaknya sekitar 6 kilometer dari pusat kota Banjarnegara. Sekretaris Desa Gentsari Heru Wiharso menuturkan, sekitar separuh dari total rumah tangga di desanya belum memiliki jamban di rumahnya, alur pembuangannya belum tepat karena ke kolam atau sungai.

Menurut Heru, selain pemanfaatan dana desa, pihak-

nya juga mengandalkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk meningkatkan ODF. "Rehabilitasi RTLH sudah seapak dengan pembuatan jamban sehat. Jadi, yang mendapat RTLH harus mau dibuatkan jamban sehat," ujarnya.

Terkait pendidikan, warga Gentsari yang mayoritas bu-ruh tani rata-rata tingkat pendidikannya hanya sebatas lulusan SD. Biaya transportasi yang tidak terjangkau menjadi salah satu kendala karena untuk melanjutkan ke tingkat SMP harus mengakses sekolah di desa lain.

Data BPS Jateng memperlihatkan, rata-rata lama seko-lah di Banjarnegara pada 2018 adalah 6,28 tahun atau kedua terendah setelah Kabupaten

Brebes yang 6,19 tahun. Sementara itu, rata-rata lama seko-lah di Wonosobo adalah 6,75 tahun atau kesembilan terendah di Jateng.

Infrastruktur

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro FX Sugiyanto me-nyatakan, kemiskinan meru-pakan muara dari banyak se-bab. Di antaranya kecilnya angka harapan hidup, rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya ketimpangan, dan produk domestik regional brutto (PDPR) per kapita yang rendah.

Ada banyak faktor yang ha-rus diperhatikan untuk meng-atasi kemiskinan itu. Namun, menurut dia, faktor pertama yang harus dibenahi adalah

persoalan infrastruktur. "Infrastruktur tidak selalu (terkait) jalan, tetapi juga pe-nidikan dan kesehatan, misal-nya. Strategi pertama adalah bangun, benahi, dan jaga ku-alitas infrastruktur," ujarnya.

Ia berpendapat, pemerintah perlu fokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lumbung-lumbung kemiskin-an, tanpa berarti mengesam-pingkan daerah lain. Kebijakan bisa berjalan jika ada alokasi anggaran. Untuk itu, koor-dinasi penganggaran dari pusat hingga daerah penting.

"Perencanaan detail, fokus, dan sinkron dari pusat hingga daerah jadi problematik pada rezim otonomi daerah. Seni mengelola pemerintahan men-jadi penting. Dalam hal ini, fungsi gubernur sentral untuk

menyinkronkan kebijakan hingga level kabupaten," kata-nya.

Berdasarkan data BPS Ja-teng, persentase penduduk miskin Jateng menunjukkan tren positif. Dari 14,44 persen penduduk miskin pada 2013, turun menjadi 13,58 persen pada 2014. Sempat stagnan pa-da 2015, lalu turun menjadi 13,27 persen pada 2016, turun sedikit menjadi 13,01 persen pada 2017, hingga turun sig-nifikan menjadi 11,32 persen pada 2018.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, pihak-nya terus menggenjot upaya penanganan kemiskinan. Per-baikkan data menjadi hal utama karena dengan pemutakhiran data itu bisa diketahui perma-salahan secara rinci, termasuk masalah kesehatan dan pen-didikan.

"Setelah data jelas, kami ke-rokok bersama karena ini ha-rus multisektor. Ada Kartu Ja-teng Sejahtera, di samping Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan rehabi-litasi RTLH. Kami juga laku-kan pemberdayaan dari sisi ekonomi. Apa yang sudah ba-gus, kami coba replikasi lagi," ujar Ganjar.

Sugiyanto juga menekankan pentingnya penguatan basis data. "Harus ada komitmen politik untuk menggunakan satu sumber data. Kita perlu lihat apa kebutuhan dari setiap desa. Sebab, setiap desa, bisa jadi sumber kemiskinannya berbeda sehingga programnya tidak harus sama," katanya.

Kemiskinan di Jateng tentu bukan hanya di wilayah te-ngh. Di Kabupaten Brebes, misalnya, yang dari segi jum-lah, masih terbanyak dengan 309.200 jiwa. Namun, wilayah tengah Jateng, dengan segala keterbatasannya, perlu menda-pai sentuhan kebijakan pena-nganatan kemiskinan dan pem-berdayaan warga.

Judul	3 Bendungan untuk cegah Banjir Konawe	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Balai wilayah Sungai Sulawesi VI tengah menyiapkan langkah antisipasi agar banjir seperti di Konawe dan Konawe Utara tidak terjadi lagi. Selain pembangunan kolam retensi, juga perlu dibangun tiga bendungan. "Kami usulkan ini untuk 2020 dan 2021. Bendungan Pelosika, AAmeroro, dan Lasolo disarankan agar dibangun," kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Haeruddin C Maddi di Kendari, Sulawesi Tenggara.		



BANJIR KONAWE: Petani membawa sepeda motornya dengan rakit melintasi banjir yang merendam sawah di Desa Puduria, Konawe, Sulawesi Tenggara, kemarin. Dampak banjir yang terjadi di empat kabupaten di Sulawesi Tenggara itu menyebabkan 10.497 hektare sawah dan ladang jagung terendam dengan nilai kerugian lebih dari Rp2 miliar.

3 Bendungan untuk Cegah Banjir Konawe

BALAI Wilayah Sungai Sulawesi VI tengah menyiapkan langkah antisipasi agar banjir seperti di Konawe dan Konawe Utara tidak terjadi lagi. Selain pembangunan kolam retensi, juga perlu dibangun tiga bendungan.

"Kami usulkan ini untuk 2020 dan 2021. Bendungan Pelosika, Ameroro, dan Lasolo disarankan agar dibangun," kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Haeruddin C Maddi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Di antara tiga bendungan yang diusulkan, menurut Haeruddin, Lasolo bakal menjadi yang terbesar dan lebih besar daripada yang terbesar saat ini dan bisa menampung 1,2 miliar m³. "Khusus

Pelosika sudah melewati sertifikasi tiga kali. Hal ini karena pertimbangan-pertimbangan tertentu," ucapnya.

Menurut dia, pertimbangan untuk membangun Pelosika sudah melalui Jakarta. "Pertimbangan dari berbagai macam aspek termasuk *visibilty*. Dari segi strukturnya, manfaatnya. Karena bendungan itu yang paling utama selalu dilihat apa tujuan utamanya dibangun. Manfaatnya apa?"

Selain manfaat, Haeruddin menyebutkan bahwa struktur tanah Sulawesi juga memengaruhi pertimbangan membangun Bendungan Pelosika. "Sulawesi Tenggara ini kan daerah tambang. Strukturnya itu tidak begitu bagus sehingga perlu rekayasa struktur."

Pada 2020, BWS usul pembangunan kolam retensi Lamuse dan Boulevard yang total luasnya sekitar 14 ha.

Selain bendungan, Haeruddin menambahkan, proyeksi 2020 dan 2021 untuk menangkal kejadian banjir serupa di Konawe dan Konawe Utara. Pada 2020, BWS usul pembangunan kolam retensi Lamuse dan Boulevard yang total luasnya sekitar 14 ha, kemudian

pembangunan 6 *check dam* dan galian alur.

Pada 2021, BWS mengusulkan pembangunan kolam retensi Baruga seluas 6 ha, tanggul banjir sepanjang 3 km, dan parapet Sungai Lepo-Lepo. Di lain hal, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPN) Yohanis Tulak menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memulihkan jalur transportasi yang terdampak banjir di Konawe dan Konawe Utara.

Satu dari dua jembatan besar yang putus saat banjir Konawe telah tersambung. "Jembatan Asera yang menghubungkan Kendari dan Sulteng yang dilalui Trans-Sulawesi sudah dihubungkan sejak Senin (17/6)," pungkasnya. (Yan/N-1)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Pembangunan Hunian Tetap: Operator alat berat meratakan lahan yang akan digunakan sebagai alokasi pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (18/6).		



ANTARA/BASRI MARZUKI

PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP: Operator alat berat meratakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (18/6). Pembangunan hunian tetap yang direncanakan sebanyak 4.000 unit bagi korban gempa, tsunami, dan likuefaksi tersebut terkendala pembebasan lahan.

Judul	PUPR Godok Skema Pemilikan Rumah untuk Milenial	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 24)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok skema pembiayaan pemilikan rumah bagi generasi milenial. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, skema yang disiapkan bertujuan mengatasi kesenjangan ketersediaan rumah (backlog) sekaligus membantu kelompok milenial yang sulit membeli hunian karena harga makin mahal.		

PUPR Godok Skema Pemilikan Rumah untuk Milenial

Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta.



Indonesia Property Expo 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 24 September lalu.

Larissa Huda

larissa.huda@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok skema pembiayaan pemilikan rumah bagi generasi milenial. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, skema yang disiapkan bertujuan mengatasi kesenjangan ketersediaan rumah (backlog) sekaligus membantu kelompok milenial yang sulit membeli hunian karena harga makin mahal. "Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang mendesak. Kami masih susun skema rumah untuk milenial supaya mereka punya pilihan," kata dia, kemarin.

Khalawi menuturkan skema kepemilikan rumah untuk kelompok milenial tersebut masih dibahas tim Kementerian PUPR ber-

"Logikanya, arah rumah yang cocok untuk generasi ini adalah rumah vertikal."

sama kalangan akademikus, swasta, dan komunitas masyarakat. Namun, secara umum, dia mengungkapkan konsep skema pembiayaan akan dibagi dalam tiga cluster. Kelompok milenial pemula, dengan kisaran usia 25-29 tahun, merupakan kategori pertama. Kelompok ini, kata dia, biasanya belum memiliki pekerjaan tetap sehingga konsep kepemilikan hunian yang cocok berupa rumah sewa vertikal atau transit-oriented development di sekitar pusat kota. Cluster kedua ada-

lah kaum milenial dengan kisaran usia 30-35 tahun yang cenderung telah berkeluarga sehingga butuh tempat tinggal yang lebih besar. Khalawi menuturkan pemerintah mencoba menyiapkan hunian sewa tipe 36. Adapun cluster terakhir adalah kelompok milenial yang sudah memiliki penghasilan tetap, sehingga memiliki selera hunian sendiri berdasarkan pendapatan.

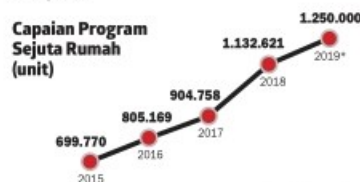
Menurut Khalawi, pemerintah pusat akan menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki lahan tak terpakai untuk menekan biaya pemilikan rumah. Skema pembiayaannya juga akan memanfaatkan pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan inovasi program penyediaan perumahan lainnya.

Tak hanya pemerintah, perbankan dan pengembang juga gencar mengga-

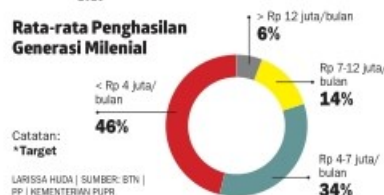
Terganjil Harga dan Akses Pembiayaan

Selama ini, pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya menggerjot pemilikan hunian lewat program sejuta rumah. Namun pada saat yang sama, kelompok milenial yang lahir pada 1980-2000-an diprediksi akan makin sulit memiliki rumah pada masa mendatang lantaran mahalnya harga dan sulitnya akses pembiayaan. Padahal jumlah mereka mencapai 30 persen dari populasi penduduk Indonesia. Kini pemerintah tengah menggodok skema baru untuk membantu kelompok ini.

Capaian Program Sejuta Rumah (unit)



Rata-rata Penghasilan Generasi Milenial



rap pasar kelompok muda yang dianggap cukup besar. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Maryono, menuturkan Bank BTN telah meluncurkan produk KPR Gaeess dan KPR Hits untuk kredit pembelian rumah atau apartemen. Adapun fitur produk yang ditawarkan berupa proses mudah, suku bunga kredit rendah dan tetap, uang muka minimal 1 persen, serta tenor kredit hingga 30 tahun. "Saya kira, dengan skema tersebut, persoalan rumah sudah tidak ada masalah lagi," ujarnya.

Direktur Reali PT PP Urban, Budi Suanda, menuturkan masalah utama dari kelompok ini adalah persoalan harga. Dalam risetnya, sebagian besar generasi milenial ingin rumah tetap. Padahal harga tanah makin tidak terjangkau. Menurut Budi, harga tanah rata-rata menyumbang 40-50 persen dari total pembiayaan rumah tetap, sementara rumah vertikal hanya sekitar 10 persen. "Logikanya, arah rumah yang cocok untuk generasi ini adalah rumah vertikal," ucapnya.

Untuk menarik kelompok milenial, Budi menuturkan PP menawarkan rumah dengan konsep *affordable living* yang menjanjikan kualitas, keterjangkauan, dan kehidupan. Menurut dia, potensi pasar produk itu cukup besar, seperti ditunjukkan sejumlah proyek, misalnya Tower I Urban Town di Serpong dan Karawang. "Sebanyak 55 persen dibeli oleh milenial," tuturnya.

Direktur Independen Ciputra Development, Tulus Santoso Brotoiswojo, mengatakan persoalan juga terus menggaet pasar *end-user* yang didominasi kelompok milenial. Strategi yang dilakukan Ciputra adalah memberikan harga terjangkau lewat desain rumah vertikal dan rumah yang lebih fungsional. Skema pembayaran yang lebih terjangkau juga disediakan, seperti cicilan uang muka yang lebih panjang. "Kami tentu bekerja sama dengan perbankan penyedia KPR (kredit pemilikan rumah)," ujar Tulus. •

Judul	Kawasan Industri Kendal & Gresik Dapat Dukungan	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai upaya untuk mendukung infrastruktur kawasan industri, khususnya di Kendal dan Gresik. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung Visium Indonesia 2045, yaitu memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung destinasi unggulan pariwisata, dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.		

► VISIUM INDONESIA 2045

Kawasan Industri Kendal & Gresik Dapat Dukungan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai upaya untuk mendukung infrastruktur kawasan industri, khususnya di Kendal dan Gresik.

Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung Visium Indonesia 2045, yaitu memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung destinasi unggulan pariwisata, dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan bahwa dukungan infrastruktur diberikan untuk wilayah kawasan industri Kendal (Jawa Tengah) dan Gresik (Jawa Timur).

"Program 2019 yang sedang berjalan di luar kawasan industri Kendal adalah preservasi jalan Weleri—Kendal—Semarang, pembangunan penyediaan air baku Kabupaten Kendal Jawa Tengah," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (18/6).

Apabila diperinci, untuk program 2020, hasil dari konsultasi regional yang telah diselenggarakan BPIW ada beberapa program arahan untuk daerah Kendal seperti pelebaran empat lajur jalan baru akses Pelabuhan Kendal dan pembangunan jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Kendal, pembangunan

tempat pembuangan akhir Darupono Baru.

Sementara itu, pelaksanaan Program Infrastruktur PUPR 2019 Kawasan Industri Kendal untuk sektor Bina Marga terutama terkait dengan jalan nasional Metropolitan Semarang, sedangkan untuk sektor Cipta Karya program yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur permukiman Kab. Kendal.

Untuk sektor Sumber Daya Air yakni pengendalian banjir Sungai Blorong dan untuk sektor Penyediaan Perumahan, salah satu programnya yakni pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Hadi menjelaskan bahwa untuk program dukungan infrastruktur PUPR di luar kawasan industri Gresik yang tengah berjalan seperti preservasi rekonstruksi jalan Surabaya—Gresik—Sadang.

Bila dilihat dari per sektor, katanya, maka pelaksanaan Program Infrastruktur PUPR 2019 untuk JIPE di antaranya preservasi rekonstruksi jalan Surabaya—Gresik—Sadang (rekonstruksi jalan) untuk sektor Bina Marga.

Untuk sektor Cipta Karya yakni Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mojolamong Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Kab. Lamongan. *(Krizia P. Kinanti)*

Judul	Lalu Lintas Tol Bakter Merangkak Naik	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT Utama Karya memperkirakan volume lalu lintas di jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar terus menanjak sejalan dengan pengoperasian dua ruas lanjutan menuju Palembang. Kepala Cabang Jalan Tol Bakauheni—Terbanggi Besar (Bakter) Hanung Hanindito mengatakan bahwa sejak beroperasi pada Maret 2018, trafik kendaraan mengalami peningkatan secara perlahan. Jalan tol sepanjang 140,90 kilometer itu juga mendapat limpahan arus kendaraan saat masa angkutan Lebaran.		

► JALAN BEBAS HAMBATAN

Lalu Lintas Tol Bakter Merangkak Naik

Bisnis, JAKARTA — PT Utama Karya memperkirakan volume lalu lintas di jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar terus menanjak sejalan dengan pengoperasian dua ruas lanjutan menuju Palembang.

Kepala Cabang Jalan Tol Bakauheni—Terbanggi Besar (Bakter) Hanung Hanindito mengatakan bahwa sejak beroperasi pada Maret 2018, trafik kendaraan mengalami peningkatan secara perlahan. Jalan tol sepanjang 140,90 kilometer itu juga mendapat limpahan arus kendaraan saat masa angkutan Lebaran.

Pada awal Mei 2019, lalu lintas harian rata-rata (LHR) tercatat 11.000 kendaraan dengan jenis kendaraan golongan I mendominasi sebanyak 70%. Pada pertengahan Juni 2019, angka LHR naik 9% menjadi 12.000 kendaraan.

“Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ketiga ruas Terbanggi Besar sampai Kayu Agung sudah beroperasi,” ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (19/6).

Jalan tol Bakter berlanjut ke dua ruas lain, yaitu Terbanggi Besar—Pematang Panggang dan Pematang Panggang—Kayu Agung. Dua ruas jalan tol

ini kerap disingkat menjadi jalan tol Terpeka itu memiliki panjang 189 kilometer (km).

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, per 24 Mei 2019, progres konstruksi jalan tol Terpeka telah mencapai sebesar 93% dan dijadwalkan beroperasi pada Juli 2019.

Pada masa Angkutan Lebaran 2019, jalan tol Terpeka juga dioperasikan secara terbatas atau fungsional.

Di sisi lain, jalan tol Terpeka juga dibuka kembali setelah ditutup pada 13 Juni 2019. Pembukaan dilakukan karena Jembatan Way Mesuji ambruk.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIX Lampung Muhammad Insal U. Maha mengatakan bahwa jalan tol Terpeka dibuka selama 14 hari hingga 4 Juli 2019.

Jalan tol dibuka untuk kendaraan pribadi dari pukul 06.00—pukul 16.00 dengan kecepatan maksimum 40 km per jam.

PT Utama Karya selaku pengelola jalan tol juga akan mengaspal jalan penghubung antara KM 323 dan jalan kabupaten di Sepucuk.

Sementara itu, kendaraan barang dialihkan di jalan lin-

tas tengah Sumatra, meliputi Terbanggi Besar—Kotabumi—Martapura—Baturaja—Simpang Sugih Waras—Muara Enim—Prabumulih—Indralaya—Palembang.

Arus lalu lintas di jalan lintas timur Sumatra terputus sejak Jembatan Way Mesuji ambruk pada 17 Juni 2019. Jembatan sepanjang 60 meter ini ambruk karena dilalui kendaraan truk yang muatannya melebihi kapasitas.

“Kejadian amblesnya Jembatan Way Mesuji tersebut bukan karena jembatan yang rapuh, melainkan karena beban yang melebihi kapasitas membuat badan jembatan ambles,” tuturnya.

CIMANGGIS—CIBITUNG

Pada bagian lain, manajemen PT Cimanggis Cibitung Tollways membenarkan kejadian terkait dengan jatuhnya besi yang menimpa pengemudi pada proyek jalan tol Cimanggis—Cibitung.

Rekaman video amatir yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan sebuah besi hollow jatuh dari ketinggian 9 meter—10 meter menancap tepat di kaca pengemudi mobil Sienta.

Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

Thorry Hendrarto menuturkan bahwa insiden yang terjadi pada Sabtu, 15 Juni itu benar adanya.

“Kejadian tersebut saat ini sudah ditangani oleh Waskita Karya selaku kontraktor dan diawasi oleh PT CCT selaku BUJT [badan usaha jalan tol], termasuk pemberian bantuan kepada pemilik kendaraan yang terkena musibah,” ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (18/6).

Manajemen perusahaan, katanya, akan melakukan evaluasi kesehatan dan keselamatan kerja dan pembenahan di proyek tersebut agar tidak terjadi lagi kecelakaan serupa maupun kejadian fatal lainnya.

Sampai saat ini, progres konstruksi ruas tol Cimanggis—Cibitung untuk seksi 1A sepanjang 3,32 km sudah mencapai 86,70%, sedangkan untuk seksi 2 sepanjang 23,01 km ditargetkan mencapai 40% awal 2020.

Secara keseluruhan, jalan tol ini dijadwalkan beroperasi pada 2020. Jalan tol yang menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 diharapkan dapat mengurai kemacetan di ruas tol JORR 1. (Krizia P. Kinanti/Rivki Maulana)

Judul	Adhi Kantongi Rp 5 Triliun	Tanggal	Kamis, 20 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT Adhi Karya Tbk. meraup perolehan kontrak baru senilai Rp5 triliun hingga Mei 2019. Perseroan meyakini perolehan kontrak baru bakal lebih banyak pada paruh kedua tahun ini sejalan dengan iklim usaha yang lebih kondusif pascapilpres. Sementara itu, kontribusi perolehan kontrak PT Wijaya Karya Tbk. dari proyek di luar negeri mencapai 14% dari total raihan perseroan secara keseluruhan.		



► RAIHAN KONTRAK

ADHI Kantongi Rp5 Triliun

Bisnis, JAKARTA — PT Adhi Karya Tbk. meraup perolehan kontrak baru senilai Rp5 triliun hingga Mei 2019. Perseroan meyakini perolehan kontrak baru bakal lebih banyak pada paruh kedua tahun ini sejalan dengan iklim usaha yang lebih kondusif pascapilpres.

*Rivki Maulana & Zulfirzal
redaksi@bisnis.com*

Sementara itu, kontribusi perolehan kontrak PT Wijaya Karya Tbk. dari proyek di luar negeri mencapai 14% dari total raihan perseroan secara keseluruhan. Direktur Keuangan PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) Entus Asnawi mengatakan bahwa perolehan kontrak hingga 5 bulan pertama tahun ini setara dengan 20% dari target perolehan kontrak baru perseroan sepanjang 2019.

Kontrak baru, katanya, berasal dari proyek energi, proyek pembangunan properti, dan sejumlah pekerjaan sipil. Beberapa proyek yang didapat Adhi Karya antara lain RDMP Office & Lab Pertamina, pembangunan *sulfur jetty* & pengerukan TUKS Migas, gedung apartemen di wilayah Cikunir, dan renovasi Gedung Karya Kementerian Perhubungan.

Entus menerangkan bahwa perolehan kontrak baru pada paruh pertama 2019 belum begitu banyak. Dia beralasan para pemilik proyek menunda pelelangan proyek-proyek baru karena berlangsung momentum pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada April 2019.

"Kemarin juga *kecegat* Lebaran. Jadi, banyak yang ditunda. Mudah-mudahan pada semester kedua lebih lancar," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (19/6).

Di sisi lain, ADHI juga telah menerima realisasi pembayaran ketiga untuk proyek kereta ringan (*light rail transit/LRT*) Jabodetabek Tahap I senilai Rp1,20 triliun (di luar pajak) pada akhir Mei 2019 dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Menurut keterangan resmi yang dilansir perseroan, pembayaran tersebut dikucurkan berdasarkan progres konstruksi LRT Jabodetabek Tahap I dalam periode Juli 2018 sampai dengan September 2018.

Secara kumulatif, ADHI telah menerima pembayaran sebanyak Rp7,10 triliun sejak September 2015. Perseroan juga telah mengajukan rencana pembayaran keempat untuk progres pekerjaan dari Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 senilai Rp2,80 triliun.

Pembayaran atas pekerjaan konstruksi LRT Jabodetabek dilakukan oleh pemerintah melalui PT KAI berdasarkan hasil progres pekerjaan yang telah dievaluasi dan diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Per 24 Mei 2019, progres pembangunan prasarana LRT Jabodetabek Tahap I telah mencapai 62,60%. Berdasarkan lintas, progres paling maju tercatat di pelayanan Cawang—Cibubur (82,30%), disusul lintas Cawang—Bekasi Timur (56,60%), dan Cawang—Kuningan—Dukuh Atas (51,50%).

KONTRAK LUAR NEGERI

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk. Tumiyana mengatakan bahwa kontribusi raihan kontrak luar negeri terhadap kontrak keseluruhan yang diperoleh perseroan mencapai 14% dari Rp60 triliun.

"Sekitar 11% sampai 12% dari kontrak luar negeri itu berasal dari Timor Leste," ujarnya selepas peresmian Bandara Penyelesaian Bandara Internasional Oe-Cusse di Wilayah Administrasi Khusus Oe-Cusse, Timor Leste, Selasa (18/6) petang waktu setempat.

Secara keseluruhan, Direktur Operasi III WIKA Destiawan Soewardjono menambahkan bahwa Aljazair masih menjadi negara utama dari proyek luar negeri yang dikantongi WIKA dengan pangsa mencapai 50%. Di negara di kawasan Afrika Utara ini, WIKA telah menyelesaikan proyek jalan tol dan perumahan.

Selebihnya, kontrak diperoleh dari negara-negara seperti Niger (proyek pembangunan istana presiden), Uni Emirat Arab (perumahan), Taiwan (proyek Moda Raya Terpadu dan jembatan bentang panjang), Myanmar (jaringan kereta api), Filipina (jalan tol layang), dan Serawak, Malaysia (jembatan).

Tumiyana menjelaskan bahwa pembangunan Bandara Oe-Cusse merupakan proyek yang kesekian kalinya diselesaikan WIKA di Timor Leste.

"Proyek [Bandara Oe-Cusse] senilai US\$120 juta ini merupakan salah satu dari sejumlah proyek kami lainnya di sini sejak 2012. [Bandara] ini proyek terbesar WIKA di Timor Leste," ujarnya.

Selain bandara, proyek yang digarap perusahaan adalah pembangkit listrik, jembatan, jalan, dan *jetty*.

Destiawan mengemukakan sejak bereksistensi ke Timor Leste pada 2012 hingga kini, perseroan sudah mengantongi kontrak senilai US\$300 juta. ■

Judul	Peminat KPR Milenial BTN Tinggi	Tanggal	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 20)		
Resume	Sejak diluncurkan pada Oktober 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan kredit yang disalurkan melalui kredit kepemilikan rumah atau KPR Gaesss mencapai Rp6,9 triliun hingga Mei 2019. Adapun dari awal tahun hingga Mei 2019 KPR Gaess mencatat outstanding kredit sebesar Rp3,83 triliun dan ditargetkan bisa mencapai sekitar Rp7 triliun hingga akhir 2019.		

► PEMBIAYAAN PROPERTI

Peminat KPR Milenial BTN Tinggi

Bisnis, JAKARTA — Sejak diluncurkan pada Oktober 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan kredit yang disalurkan melalui kredit kepemilikan rumah atau KPR Gaesss mencapai Rp6,9 triliun hingga Mei 2019.

Adapun dari awal tahun hingga Mei 2019 KPR Gaess mencatat *outstanding* kredit sebesar Rp3,83 triliun dan ditargetkan bisa mencapai sekitar Rp7 triliun hingga akhir 2019.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, generasi milenial masih memiliki potensi yang besar. Pasalnya, generasi ini akan akan mendominasi sekitar 34% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2020.

"Seluruh *stakeholder* bidang properti harus bisa menyelaraskan strategi serta kebijakan dengan kebutuhan dan karakter generasi milenial. BTN menyediakan produk tabungan untuk KPR yaitu Si Muda Rumahku Tabungan untuk kepemilikan rumah bagi mahasiswa dan pemuda, dan produk KPR Gaesss, yaitu produk KPR yang dikemas dengan KPR Zero yang memiliki fitur kemudahan bagi milenial," katanya dalam acara Indonesia Housing Forum di Jakarta, Rabu (19/6).

Maryono memaparkan, berdasarkan survei yang digelar BTN Housing Finance Center atau HFC terhadap 270 responden berusia 21-35 tahun yang dipilih dari wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek, Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo) dan Batam, generasi milenial ingin memiliki rumah tapak dengan harga terjangkau.

Selain itu, kriteria yang diinginkan milenial adalah cicilan dengan tenor KPR selama 10-15 tahun serta cicilan yang sesuai dengan kemampuan.

"Produk KPR yang diinginkan milenial harus mudah dipahami, sesuai dengan kemampuan keuangan mereka serta harus sudah disiapkan atau dimulai sejak mereka duduk dibangku SMA atau perguruan tinggi lewat produk tabungan untuk KPR," kata Maryono.

Dia menjelaskan kontribusi perseroan untuk mendorong laju sektor properti didasarkan pada visi dan misi perseroan untuk menyediakan perumahan yang layak dan berkelanjutan bagi setiap generasi.

"Apalagi rasio KPR terhadap PDB hanya 2,9% lebih rendah dibandingkan Malaysia dengan rasio 38,4% dan Filipina dengan

rasio 22,3%, dengan rasio yang masih rendah artinya masih banyak ruang bisnis perumahan yang bisa dikembangkan, dan memajukan sektor properti itu berarti memberikan *multiplier effect* atau efek bergulir bagi 136 subsektor properti lain," terangnya.

Adapun per Mei 2019, BTN telah memberikan dukungan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR sebanyak 386.137 unit rumah, baik pembiayaan KPR maupun Konstruksi.

Khusus untuk pembiayaan perumahan MBR, baik KPR subsidi maupun kredit konstruksi, BTN telah menyalurkan sebanyak 272.600 unit rumah dengan jumlah kredit Rp17,24 triliun, yang terdiri dari KPR subsidi 93.221 unit dengan jumlah kredit Rp11,89 triliun dan kredit konstruksi rumah MBR 179.379 unit jumlah kredit Rp4,35 triliun.

Maryono menambahkan, pihaknya optimistis pada tahun ini harga properti akan semakin meningkat, seiring dengan diselesaikannya proyek-proyek infrastruktur yang telah digagas pemerintah. (Maria Elena)